

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur secara mandiri permasalahan rumah tangga daerah pada ruang lingkup pemerintahannya masing-masing seperti dalam pengolahan keuangan daerah. Kewenangan tersebut menyebabkan pemerintah daerah wajib untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaporkan pada tiap akhir periode. Ketika pemerintah daerah telah menyusun LKPD maka akan dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah, setelah itu akan diberikan rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR).

Oleh karena itu, LKPD harus dipastikan terlebih dahulu bahwa penyusunannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Maka, sebelum LKPD diserahkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK akan dilakukan reviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan

memastikan agar LKPD yang telah dibuat sudah sesuai dengan SAP dan SPI yang memadai.

LKPD Kota Bekasi dalam enam tahun sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut. Hal ini membuktikan bahwa LKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi sudah sesuai dengan SAP dan SPI yang memadai.

Oleh karena itu, penulis menaruh ketertarikan untuk mengetahui secara mendalam tentang proses reviu yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi atas LKPD Kota Bekasi Tahun 2020 dan ingin mengetahui bagaimana LKPD Kota Bekasi mendapatkan opini WTP oleh BPK. Dikarenakan hal tersebut, maka penulis menyusun karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS REVIU LKPD KOTA BEKASI TAHUN 2020 OLEH INSPEKTORAT KOTA BEKASI”.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta mempermudah penulis dalam proses penyusunan karya tulis, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tahapan proses reviu yang telah dijalankan oleh Inspektorat Kota Bekasi sebagai APIP Kota Bekasi?
2. Apakah tahapan proses yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Apakah terdapat perbedaan pada tahun 2020 dengan 2021 dalam tahapan proses reviu terhadap LKPD Kota Bekasi?

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis menyusun karya tulis tugas akhir ini, yaitu:

1. Meninjau tahapan proses reviu Inspektorat Kota Bekasi yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mencermati tahapan proses reviu yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Inspektorat Kota Bekasi.
3. Mengidentifikasi apabila ditemukan perbedaan dalam tahapan proses reviu serta kendala yang dihadapi pada tahun 2021 oleh Inspektorat Kota Bekasi atas reviu LKPD Kota Bekasi.

## **1.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Pembahasan karya tulis ini akan dibatasi ruang lingkup pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020. Pada karya tulis tugas akhir ini, penulis akan melakukan perbandingan terhadap kesesuaian pada tahapan proses reviu yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua serta menjelaskan terkait penyebab yang menjadikan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian atas tahapan proses yang dilakukan.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Penulis berharap pada karya tulis tugas akhir ini memiliki manfaat serta dapat berguna pada pihak-pihak berikut.

1. Bagi Penulis

Karya tulis tugas akhir ini bermanfaat sebagai sarana implementasi ilmu-ilmu yang telah penulis dapatkan selama pendidikan serta memperdalam ilmu tentang tahapan proses reviu LKPD yang dilakukan oleh Inpektorat Daerah Kota Bekasi.

## 2. Bagi Akademik

Karya tulis tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi akademis dalam hal bagaimana tahapan proses yang benar dan sesuai aturan dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

## 3. Bagi Inspektorat

Karya tulis tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana referensi agar kedepannya dapat meningkatkan efektivitas pengendalian Intern khususnya dalam hal pelaksanaan reviu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan peran dan kualitas inspektorat daerah dalam melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis merancang sistematika penulisan dengan tujuan agar karya tulis yang dihasilkan dapat tersusun secara runtut dan rapih serta agar dapat memahami struktur penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir yang akan disusun ini. Berikut struktur penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisikan penjelasan tentang gambaran umum pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, pembahasan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Selain itu, diuraikan juga mengenai bagaimana metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk meninjau tahapan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisikan landasan teori yang digunakan penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Landasan teori yang digunakan seperti peraturan pemerintah sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan reviu. Pada bab ini, penulis memberikan penjelasan singkat mengenai definisi reviu, tahapan pelaksanaan reviu, tujuan dari pelaksanaan reviu, serta prosedur reviu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III menjelaskan tentang metode yang dipakai oleh penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir, seperti data berupa peninjauan reviu LKPD oleh Inspektorat Kota Bekasi. Setelah itu akan dijelaskan secara umum tentang profil Inspektorat Kota Bekasi. Pembahasan dijelaskan berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang reviu atas LKPD, serta data berupa hasil analisis atas kuesioner dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis. Selain itu, penulis akan melakukan perbandingan

kesesuaian atas tahapan-tahapan reuiu yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018. Apabila selama proses perbandingan tersebut ditemukan ketidaksesuaian tahapan dalam pelaksanaan reuiu, maka penulis akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Pembahasan diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang telah dijabarkan pada pendahuluan.

#### BAB IV PENUTUP

Bab IV berisikan penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir yang berupa penjelasan kesimpulan serta saran dari pembahasan yang telah dijabarkan mengenai tinjauan tahapan reuiu yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi pada tahun 2020 atas LKPD Kota Bekasi.